

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Peserta BPJS Mandiri

Factors Associated With Community Participation In Becoming Independent BPJS Participants

Eko Heryanto, Fera Meliyanti, Sabtian Sarwoko

¹²³Program Studi S-1 Kesehatan Masyarakat STIKES Al-Ma'arif Baturaja

Email : ekoheryantoytb@gmail.com

Submisi:26 Juni 2023; Penerimaan: 30 Juli 2023 ; Publikasi 30 Agustus 2023

ABSTRAK

Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga diatur dalam Peraturan Presiden No.111 dalam pasal 6 bahwa seluruh penduduk Indonesia diwajibkan untuk terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan. Data Jumlah peserta BPJS di Kabupaten OKU pada tahun 2020 sebanyak 218.003 peserta, tahun 2021 sebanyak 216.387 peserta dan pada tahun 2022 sebanyak 243.067 peserta. Sementara untuk wilayah puskesmas Tanjung Baru jumlah peserta BPJS pada tahun 2020 sebanyak 3.782 peserta, tahun 2021 sebanyak 3.745 peserta dan pada tahun 2022 sebanyak 3.888 peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri di Desa Tanjung Baru. Desain penelitian yang digunakan adalah desain penelitian Cross Sectional. Sampel adalah seluruh kepala keluarga di Desa Tanjung Baru wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanjung Baru Kabupaten OKU tahun 2022 yang berjumlah 2544 KK dengan besar sampel 339 sampel. Uji statistik yang digunakan adalah uji chi square. Berdasarkan analisis univariat diperoleh hasil sebanyak 134 (39,5%) responden dengan status peserta, sebanyak 163 (48,1%) responden berpengetahuan baik, sebanyak 173 (44,8%) responden dengan sikap positif, sebanyak 154 responden (45,5%) dengan pendapatan tinggi dan sebanyak 159 (46,9%) responden menyatakan ada dukungan keluarga. Hasil analisis bivariat diperoleh hasil variabel pengetahuan dengan *p value* 0,001, sikap dengan *p value* 0,000, pendapatan dengan *p value* 0,000, dan dukungan keluarga dengan *p value* 0,001. Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan, sikap, pendapatan dan dukungan keluarga dengan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri di Desa Tanjung Baru.

Kata Kunci: BPJS, dukungan keluarga, pengetahuan, pendapatan, sikap

ABSTRACT

The participation of the Social Security Administering Body (BPJS) is also regulated in Presidential Regulation No. 111 in article 6 that all Indonesian residents are required to be registered as health insurance participants. Data on the number of BPJS participants in OKU Regency in 2020 as many as 218,003 participants, in 2021 as many as 216,387 participants and in 2022 as many as 243,067 participants. Meanwhile, for the Tanjung Baru puskesmas area, the number of BPJS participants in 2020 was 3,782 participants, in 2021 there were 3,745 participants and in 2022 there were 3,888 participants. This study aims to determine the factors related to community participation in becoming independent BPJS participants in Tanjung Baru Village. The research design used was a cross sectional research design. The sample is all heads of families in Tanjung Baru Village, the working area of UPTD Tanjung Baru Health Center, OKU Regency in 2022, totaling 2544 families with a sample size of 339 samples. The statistical test used is the chi square test. Based on the univariate analysis, the results obtained were 134 (39.5%) respondents with participant status, as many as 163 (48.1%) respondents with good knowledge, 173 (44.8%) respondents with positive attitudes, as many as 154 respondents (45.5%) with high income and 159 (46.9%) respondents stated that there was family support. The results of the bivariate analysis obtained the results of the knowledge variable with a *p value* of 0.001, attitudes with a *p value* of 0.000, income with a *p value* of 0.000, and family support with a *p value* of 0.001. there is a significant relationship between knowledge, attitudes, income and family support with community participation in becoming independent BPJS participants in Tanjung Baru Village.

Keywords: BPJS, family support, knowledge, income, attitude

Pendahuluan

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan komitmen global setiap negara mengemban *Universal Health Coverage* (UHC) bagi seluruh penduduk, maka pemerintah bertanggung jawab atas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Badan Penyelenggara Jaminan Sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) (Melinda, 2016).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dikeluarkan pada tahun 2004. Undang-Undang ini mengamanatkan bahwa program jaminan sosial wajib bagi seluruh penduduk termasuk program Jaminan Kesehatan melalui suatu badan penyelenggara jaminan sosial. Badan penyelenggara jaminan sosial telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk program Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan, implementasinya telah dimulai sejak 1 Januari 2014. Program tersebut selanjutnya disebut sebagai program JKN (Kemenkes, 2014).

Implementasi JKN menjadi bagian penting dalam pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) dimana system pelayanan kesehatan Indonesia bertransisi dengan target menyediakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Jaminan kesehatan merupakan jaminan perlindungan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang, baik yang telah membayar iuran maupun yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah (Al Husna, 2020).

Berdasarkan Peraturan Presiden No.82 tentang Jaminan Kesehatan, Program Jaminan Kesehatan Nasional dimaksudkan untuk menjadikan setiap orang sebagai peserta baik yang membayar iuran ataupun yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Peserta Jaminan Kesehatan Nasional terdiri atas dua jenis, yakni Peserta Penerima Bantuan Iuran dan Bukan Penerima Bantuan Iuran. Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) juga diatur dalam Peraturan Presiden No.111 dalam pasal 6 bahwa seluruh penduduk Indonesia diwajibkan untuk terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan (Perpres no. 111, 2013) (BPJS Kesehatan, 2018).

BPJS Kesehatan menargetkan pada tahun 2017 akan terdapat 90% lebih rakyat Indonesia sudah mengikuti program JKN. Namun, pada kenyataannya peserta JKN yang sudah terdaftar di Indonesia berjumlah 179.474.296 jiwa dengan proporsi 68,53% (per 1 Agustus 2017). Jadi, jumlah peserta JKN yang ditargetkan oleh BPJS Kesehatan saat ini masih belum mencapai target (BPJS, 2018).

Menurut data profil kesehatan oleh Kementerian Kesehatan RI menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil estimasi pada tahun 2018 sebesar 265.015313 jiwa, yang terdiri atas 133.136.131 jiwa penduduk laki-laki dan 131.879.182 jiwa penduduk perempuan. Berdasarkan data BPJS Kesehatan jumlah penduduk Indonesia yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan per 31 Mei 2020 adalah 220.687.267 jiwa. Peserta yang paling banyak menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional berasal dari golongan peserta penerima bantuan iuran (PBI) Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebanyak 96.616.495 jiwa Kemudian, 17.635.205 jiwa peserta merupakan pekerja penerima upah (PPU) Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bukan pekerja sebesar 5.009.418 jiwa dan yang terakhir PBPUPU pekerja mandiri 30.330.226 jiwa yang dimana masih kecilnya partisipasi dari Pekerja mandiri atau sektir

informal ini dalam kepesertaan sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS, 2020).

Untuk Provinsi Sumatera Selatan sendiri pengguna BPJS sebanyak 4.301.539 peserta (46%). Peserta PBI terdiri dari peserta dengan iuran bersumber dari APBN berjumlah 2.944.932 peserta dan yang PBI terdiri atas pekerja penerima upah berjumlah 249.555 peserta dan bukan pekerja berjumlah 238.599 peserta (BPJS, 2020).

Data Jumlah peserta BPJS di Kabupaten OKU pada tahun 2020 sebanyak 218.003 peserta, tahun 2021 sebanyak 216.387 peserta dan pada tahun 2022 sebanyak 243.067 peserta. Sementara untuk wilayah puskesmas Tanjung Baru jumlah peserta BPJS pada tahun 2020 sebanyak 3.782 peserta, tahun 2021 sebanyak 3.745 peserta dan pada tahun 2022 sebanyak 3.888 peserta (BPJS Kab. OKU, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sikap, pendapatan dan dukungan keluarga dengan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri.

Berdasarkan studi pendahuluan, Salah satu alasan utama masyarakat Desa Tanjung Baru tidak menjadi peserta BPJS Mandiri adalah keterbatasan ekonomi. Beberapa masyarakat mungkin tidak mampu membayar premi BPJS Mandiri, terutama bagi mereka yang berpenghasilan rendah atau tidak memiliki pendapatan tetap. Selain itu sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari manfaat dan pentingnya memiliki BPJS Mandiri. Kurangnya informasi dan kampanye sosialisasi dari pemerintah atau lembaga terkait bisa menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran akan program ini. Beberapa masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Mandiri atau fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengannya. Persepsi buruk tentang kualitas pelayanan dapat membuat mereka enggan menjadi peserta.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul faktor-faktor yang berhubungan dengan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri di Desa Tanjung Baru Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Baru Kabupaten OKU tahun 2022

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain *Cross Sectional*. Variabel independen adalah pengetahuan, sikap, pendapatan dan dukungan keluarga. Sedangkan yang variabel dependen adalah keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri. Populasi adalah seluruh kepala keluarga di Desa Tanjung Baru wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanjung Baru Kabupaten OKU tahun 2022 yang berjumlah 2544 KK. Sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti yang merupakan representasi dari populasi tersebut berjumlah 339 sampel. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama bulan Oktober–Desember 2022. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Cara pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* (pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu). Analisis data menggunakan analisis univariat dan analisis bivariat.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Univariat

Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Peserta BPJS Mandiri

| No | Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Peserta BPJS Mandiri | Jumlah | (%) |
|----|---|--------|------|
| 1 | Peserta | 134 | 39,5 |
| 2 | Bukan Peserta | 205 | 60,5 |
| | Jumlah | 339 | 100 |

Pengetahuan

| No | Pengetahuan | Jumlah | (%) |
|----|-------------|--------|------|
| 1 | Baik | 163 | 48,1 |

| | | | |
|--------|------------|-----|------|
| 2 | Tidak Baik | 176 | 51,9 |
| Jumlah | | 339 | 100 |

Sikap

| No. | Sikap | Jumlah | (%) |
|-------|---------|--------|-----|
| 1. | Positif | 173 | 51 |
| 2. | Negatif | 166 | 49 |
| Total | | 339 | 100 |

Pendapatan

| No. | Pendapatan | Jumlah | (%) |
|-------|------------|--------|------|
| 1. | Tinggi | 154 | 45,5 |
| 2. | Rendah | 185 | 54,6 |
| Total | | 339 | 100 |

Dukungan Keluarga

Analisis Bivariat

| No. | Dukungan Keluarga | Jumlah | (%) |
|-------|--------------------|--------|------|
| 1. | Ada Dukungan | 159 | 46,9 |
| 2. | Tidak Ada Dukungan | 180 | 53,1 |
| Total | | 339 | 100 |

Berdasarkan analisis univariat diperoleh hasil sebanyak 134 (39,5%) responden dengan status peserta, sebanyak 163 (48,1%) responden berpengetahuan baik, sebanyak 173 (44,8%) responden dengan sikap positif, sebanyak 154 responden (45,5%) dengan pendapatan tinggi dan sebanyak 159 (46,9%) responden menyatakan ada dukungan keluarga.

Tabel 2
Analisis Hubungan Variabel Independen dengan Variabel Dependen di Desa Tanjung Baru wilayah kerja UPTD Puskesmas Tanjung Baru Kabupaten OKU tahun 2022

| No | Variabel Independen | Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Peserta BPJS Mandiri | | Jumlah | ρ value |
|----|---------------------|---|----------------|---------------|--------------|
| | | Peserta | Bukan Peserta | | |
| 1 | Pengetahuan | | | | 0,001 |
| | 1. Baik | 100 (61,3%) | 63 (38,7%) | 163 (100%) | |
| | 2. Tidak Baik | 34 (19,3%) | 142 (80,7%) | 176 (100%) | |
| | Jumlah | 134 (39,5%) | 205 (60,5%) | 339 (100%) | |
| 2 | Sikap | | | | 0,000 |
| | 1. Positif | 110 (63,6%) | 63 (36,4%) | 173 (100%) | |
| | 2. Negatif | 24 (14,5%) | 142 (85,5%) | 116 (100%) | |
| | Jumlah | 134 (39,5%) | 205 (60,5%) | 339 (100%) | |
| 3 | Pendapatan | | | | 0,000 |
| | 1. Tinggi | 118 (76,6%) | 36 (23,4%) | 154 (100%) | |
| | 2. Rendah | 16 (8,6%) | 169 (91,4%) | 185 (100%) | |
| | Jumlah | 134 (39,5%) | 205 (60,5%) | 339 (100%) | |
| 4 | Dukungan Keluarga | | | | 0,001 |
| | 1. Ada | 95 (59,7%) | 64 (40,3%) | 159 (100%) | |
| | 2. Tidak Ada | 39 (21,7%) | 141 (78,3%) | 180 (100%) | |
| | Jumlah | 134 (39,5%) | 205 (60,5%) | 339 (100%) | |

Berdasarkan hasil analisis bivariat diperoleh hasil ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri dengan *p value* 0,001, ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri dengan *p value* 0,000, ada hubungan yang bermakna antara pendapatan dengan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri dengan *p value* 0,000, ada hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri dengan *p value* 0,001.

Hubungan pengetahuan dengan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri di Desa Tanjung Baru Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Baru Kabupaten OKU tahun 2022.

Berdasarkan analisis univariat diketahui bahwa dari 339 responden sebanyak 163 (48,1%) responden berpengetahuan baik sedangkan responden yang berpengetahuan tidak baik yaitu sebanyak 176 (51,9%) responden. Uji statistik diperoleh *p value* 0,001. Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan dengan Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Peserta BPJS Mandiri.

Pengetahuan masyarakat mengenai asuransi kesehatan sosial adalah faktor yang utama masyarakat mengikuti atau tidak dalam kepesertaan BPJS kesehatan. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui sumber informasi tertentu, seperti media massa, forum pertemuan dan sumber lainnya. Pengetahuan akan memberikan pengaruh pada keputusan seseorang untuk menjadi anggota asuransi kesehatan sosial. Dengan mengetahui manfaat dan pentingnya jaminan kesehatan maka mempengaruhi perilaku dalam mengikuti jaminan kesehatan (Oktriyanto, 2016).

Semakin baik pemahaman seseorang tentang asuransi maka semakin besar pula kemungkinan untuk mengikutinya. Jika seseorang sudah mengikuti produk asuransi, maka secara sadar mereka mengerti apa manfaat yang akan didapatkan dari asuransi tersebut. Pemahaman yang mendalam bukan hanya mempengaruhi keputusan berperilaku sesaat, namun juga memberikan pengaruh dalam waktu yang lama. Perilaku yang dilakukan secara terus menerus tersebut didasari oleh adanya pemahaman suatu hal (Rohmawati, 2018).

Hal ini selaras dengan teori Lawrece Green dalam Notoatmodjo (2017), yang menyatakan bahwa tingkat pengetahuan merupakan salah satu faktor predisposing. Tanpa pengetahuan yang baik tidak mungkin seseorang mau mengikuti program JKN dengan konsekuensi harus membayar premi setiap bulan dan belum tentu seseorang tersebut merasakan manfaatnya.

Sejalan dengan hasil penelitian Nadhiroh (2021) tentang Determinan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Grobogan Kabupaten Grobogan dengan hasil uji *chi square* menunjukkan *p value* 0,001 (<0,05) yang berarti terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan kepemilikan JKN.

Dalam penelitian ini sebagian besar pengetahuan responden adalah tidak baik yaitu 51,9%. Menurut asumsi peneliti hal ini dipengaruhi pendidikan responden. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi dapat lebih memahami, mengetahui manfaat dan kebutuhannya yang dianggap penting, misalnya kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh Negara dengan cara membayar iuran jaminan kesehatan. Sebaliknya jika seseorang memiliki tingkat pendidikan rendah dapat menurunkan keinginannya dalam membayar iuran jaminan kesehatan yang disebabkan karena tingkat pemahaman dan pengetahuannya yang masih rendah.

Dengan demikian, pengetahuan memiliki peran yang sangat penting terkait dengan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjadi peserta BPJS, sehingga perlu adanya sosialisasi secara berkala dari petugas BPJS Kesehatan untuk memotivasi masyarakat menjadi peserta BPJS. Upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial (facebook, instagram, whatsapp) maupun media cetak (brosur/leaflet).

Hubungan sikap dengan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri di Desa Tanjung Baru Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Baru Kabupaten OKU tahun 2022.

Berdasarkan analisis univariat diketahui bahwa dari 339 responden sebanyak 173 (44,8%) responden dengan sikap positif sedangkan responden dengan sikap negatif yaitu 166 (49%) responden. Hasil uji statistik diperoleh *p value* 0,000. Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang bermakna antara sikap dengan Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Peserta BPJS Mandiri.

Sikap adalah pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap yang obyek tadi. Jadi sikap senantiasa terarah terhadap suatu hal, suatu obyek, tidak ada sikap yang tanpa obyek (Purwanto, 2018).

Sikap merupakan faktor yang berperan dalam perilaku kesehatan. Sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan, untuk mewujudkan sikap tersebut maka diperlukan suatu tindakan nyata dan faktor pendukung lainnya dalam mengkondisikan sikap tersebut serta difasilitasi (Notoatmodjo, 2017).

Sikap baik masyarakat tentang BPJS Kesehatan sangat berpengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan. Semakin masyarakat bersikap positif dan mendukung, maka kecenderungan masyarakat dalam memanfaatkan BPJS akan semakin tinggi. Sikap mendukung

terhadap BPJS Kesehatan memiliki kemungkinan berminat menjadi peserta lebih besar dari dengan sikap kurang mendukung. Baik dan buruknya sikap seseorang terhadap sesuatu akan mempengaruhi perilakunya dalam bertindak.

Sejalan dengan hasil penelitian Laila dkk (2020), tentang Determinan Keputusan Pekerja Mandiri menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional mendapatkan hasil *p value* 0,000. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan antara sikap dengan keputusan pekerja mandiri menjadi peserta JKN.

Dalam penelitian ini didapatkan hasil sebagian besar responden dengan sikap positif yaitu sebanyak 173 responden (44,8%). Menurut asumsi peneliti sikap dipengaruhi oleh motivasi yang dimiliki orang tersebut. Motivasi dapat dipicu oleh berbagai hal, baik yang positif maupun negatif. Motivasi positif dalam membayar iuran kesehatan mungkin saja timbul pada saat seseorang benar-benar ingin mendapatkan jaminan kesehatan, misalnya ketika mereka sakit. Sementara itu motivasi negatif karena alasan tertentu misalnya peserta belum mengetahui secara jelas tentang peraturan, ketentuan dan manfaat yang diterima dari BPJS.

Masyarakat yang mempunyai sikap positif terhadap tempat pelayanan kesehatan yang memiliki kerja sama dengan asuransi BPJS akan memiliki kesadaran menjadi peserta jaminan kesehatan karena telah mendapatkan pengalaman menerima pelayanan yang baik dari tempat pelayanan kesehatan. Dengan demikian, perlu adanya koordinasi antara tempat pelayanan kesehatan dengan pihak asuransi untuk menciptakan sikap dan harapan positif sehingga dapat memotivasi masyarakat untuk mengikuti jaminan kesehatan/BPJS.

Pihak BPJS dapat membangun pandangan yang lebih baik di mata masyarakat dan juga agar dapat meningkatkan kualitas program sehingga

dapat meningkatkan sikap positif masyarakat tentang BPJS Kesehatan.

Hubungan pendapatan dengan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri di Desa Tanjung Baru Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Baru Kabupaten OKU tahun 2022.

Berdasarkan analisis univariat diketahui bahwa dari 339 responden sebanyak 154 responden (45,5%) dengan pendapatan tinggi sedangkan responden yang pendapatan rendah yaitu sebanyak 185 responden (54,6%). Hasil uji statistik diperoleh *p value* 0,000. Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang bermakna antara Pendapatan dengan Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Peserta BPJS Mandiri.

Pendapatan keluarga adalah jumlah penghasilan riil dari seluruh anggota rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun perseorangan dalam rumah tangga. Pendapatan keluarga merupakan balas karya atau jasa atau imbalan yang diperoleh karena sumbangan yang diberikan dalam kegiatan produksi. Tingkat pendapatan setiap keluarga berbeda. Terjadinya perbedaan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain jenis pekerjaan, jumlah anggota keluarga yang bekerja.

Masyarakat memiliki perbedaan-perbedaan latar belakang sosial budaya. Pada kelompok masyarakat dengan kelas sosial rendah cenderung kurang menyadari pentingnya kesehatan. Kurangnya penerapan hidup sehat membuat mereka mengabaikan pentingnya pencegahan penyakit, pencegahan risiko pembiayaan kesehatan serta mengabaikan ilmu terkait kesehatan. Hal tersebut sesuai dengan *Health Belief Model* yang menyatakan perilaku seseorang dipengaruhi adanya sosiopsikologis (Rustiana, 2017).

Besarnya penghasilan yang diterima oleh seseorang akan mempengaruhi kemauan seseorang untuk mendaftar menjadi peserta asuransi kesehatan. Masyarakat yang mempunyai pendapatan yang lebih tinggi, memutuskan menjadi peserta BPJS karena mereka yang mempunyai penghasilan yang cukup akan mempertimbangkan dengan baik untuk mengikuti BPJS. Keputusan menjadi peserta BPJS karena masyarakat berasumsi bahwa untuk memutuskan menjadi peserta BPJS harus memiliki penghasilan yang cukup karena setiap bulannya dituntut untuk melakukan pembayaran iuran secara rutin.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Azinar (2018) yang mengatakan bahwa menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara penghasilan dengan kepesertaan JKN secara mandiri ($p=0,010$). Pendapatan masyarakat mempunyai pengaruh terhadap keikutsertaan masyarakat dalam JKN. Pendapatan masyarakat yang tinggi akan meningkatkan minat dan kesadaran masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi kesehatan.

Dalam penelitian ini sebagian besar responden dengan pendapatan rendah yaitu 54,6%. Menurut asumsi peneliti tingkat pendapatan dengan kesadaran masyarakat dalam berasuransi memiliki hubungan yang bermakna. Seseorang yang semakin tinggi tingkat pendapatan maka akan semakin sadar untuk mengikuti asuransi dan teratur dalam membayar iuran, sebaliknya masyarakat dengan pendapatan rendah lebih banyak yang tidak menjadi peserta BPJS mandiri hal ini karena mereka merasa tidak mampu untuk membayar iuran BPJS Kesehatan Mandiri.

Untuk itu hendaknya kepada Puskesmas Tanjung Baru dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten OKU melakukan pengadaan Kartu Indonesia Sehat bagi masyarakat yang kurang mampu sehingga masyarakat yang kurang mampu juga dapat

mendapatkan asuransi kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Hubungan dukungan keluarga dengan keikutsertaan masyarakat menjadi peserta BPJS mandiri di Desa Tanjung Baru Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Tanjung Baru Kabupaten OKU tahun 2022.

Berdasarkan hasil analisa data diketahui bahwa dari 339 responden sebanyak 159 (46,9%) responden menyatakan ada dukungan keluarga sedangkan responden yang menyatakan tidak ada dukungan keluarga yaitu sebanyak 180 (53,1%) responden. Hasil uji statistik diperoleh *p value* 0,001. Hal ini berarti bahwa ada hubungan yang bermakna antara dukungan keluarga dengan Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Peserta BPJS Mandiri.

Keluarga adalah dua atau lebih dari dua individu yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka hidup dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan kebudayaan. Keluarga adalah dua atau lebih individu yang bergabung karena hubungan darah, perkawinan dan adopsi dalam satu rumah tangga, yang berinteraksi satu dengan lainnya dalam peran dan menciptakan serta mempertahankan suatu budaya. Dukungan keluarga adalah sikap, tindakan dan penerimaan keluarga terhadap anggotanya. Anggota keluarga dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam lingkungan keluarga. Anggota keluarga memandang bahwa orang yang bersifat mendukung selalu siap memberikan pertolongan dan bantuan jika diperlukan (Kusumaningrum, 2018).

Masyarakat yang mendapatkan dukungan keluarga kemungkinan besar

akan memutuskan menjadi peserta BPJS mandiri atau sebaliknya. Peran keluarga sebagai pendukung bagi anggotanya yang dapat berupa dukungan emosional seperti ungkapan empati, kepedulian dan perhatian.. Keluarga merupakan orang yang paling dekat dan yang pertama berperan dalam memberikan masukan dan motivasi terhadap seseorang ketika sedang berada dalam masalah termasuk keputusan menjadi peserta BPJS. Dukungan keluarga dapat berupa dukungan informasi terkait BPJS yaitu informasi mengenai iuran, cara mendaftar, tempat mendaftar, manfaat BPJS. Dukungan informasi merupakan dukungan penting yang diberikan oleh keluarga terdekat dalam pengambilan tindakan untuk ikut serta menjadi peserta BPJS (Nadiyah, 2017).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Abadi dkk, (2019) dengan judul Analisis Kepesertaan Mandiri BPJS Kesehatan Di Sektor Informal (Studi Di Kota Makassar), hasil uji statistik dengan diperoleh nilai *p* 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh dukungan keluarga responden terhadap keikutsertaan BPJS Kesehatan Mandiri pada sektor informal di Kota Makassar.

Dalam penelitian sebagian besar responden tidak ada dukungan dari keluarga yaitu sebesar 53,1%. Menurut asumsi peneliti bahwa masyarakat yang mempunyai dukungan keluarga kemungkinan besar mengikuti BPJS Kesehatan mandiri, dan masyarakat yang tidak mendapat dukungan keluarga cenderung tidak mengikuti BPJS Kesehatan mandiri. Adanya dukungan baik secara moril dan materiil menunjukkan bahwa keluarga responden sangat peduli dan memperhatikan kondisi anggota keluarganya sehingga cenderung untuk mendukung keikutsertaan dalam JKN.

Disarankan bagi masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang BPJS dan meningkatkan dukungan keluarga untuk ikut serta dalam progam BPJS.

Kesimpulan Dan Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan antara lain: rendahnya kesadaran masyarakat tentang BPJS Mandiri dan kurangnya pemahaman mengenai manfaat serta proses keikutsertaan. Hal ini menyulitkan peneliti dalam mengumpulkan data yang akurat dan relevan. Penggunaan kuesioner dalam penelitian tentang keikutsertaan BPJS Mandiri dapat menghadapi kendala seperti bias respons, kurangnya pemahaman responden terhadap pertanyaan, dan sulitnya mendapatkan tanggapan dari semua target responden.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut:

Ada hubungan yang bermakna antara pengetahuan, sikap, pendapatan dan dukungan keluarga dengan Keikutsertaan Masyarakat Menjadi Peserta BPJS Mandiri. Variabel pengetahuan dengan *p value* 0,001, sikap dengan *p value* 0,000, pendapatan dengan *p value* 0,000, dan dukungan keluarga dengan *p value* 0,001

Perlu adanya sosialisasi secara berkala dari petugas BPJS Kesehatan untuk memotivasi masyarakat menjadi peserta BPJS. Upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial (facebook, instagram, whatsapp) maupun media cetak (brosur/leaflet).

Referensi

Abadi Muhammad Yusri, 2019. Analisis Keikutsertaan BPJS Kesehatan Mandiri Pada Sektor Informal di Kota Makassar. [Vol 5, No 2 \(2019\): JMK Yayasan RS.Dr.Soetomo, Oktober 2019](#)

Al Husna Risna, 2020. Faktor yang Berhubungan dengan Keikutsertaan BPJS Kesehatan pada Pedagang Di Pasar Niaga Daya Kota Makassar Tahun 2020. Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar

BPJS Kab. OKU, 2021. Kabupaten Ogan Komering Ulu: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

BPJS Kesehatan, 2018. Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan. BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan, 2020. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan. Retrieved

Kementerian Kesehatan RI, 2014. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kementerian Kesehatan RI

Kusumaningrum, A., & Azinar, M. 2018. Kepesertaan Masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional secara Mandiri. *HIGEIA (Journal of Public Health Research and Development)*, 2(1), 149-160. Jurnal Penelitian

Laila Jumatra, dkk, 2020. Determinan Keputusan Pekerja Mandiri menjadi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional. [Vol. 14 No. 1 \(2020\): Disease Prevention and Public Health Journal](#)

Melinda, Anneke S dan Antono S, 2016. Faktor-faktor yang berhubungan dengan minat masyarakat dalam keikutsertaan BPJS Mandiri di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 4 (4), 86-92. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jkm/article/view/13945>

Nadhiroh, and F. Indrawati, "Determinan Kepemilikan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Pada Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Grobogan Kabupaten Grobogan,"

Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip), vol. 9, no. 6, pp. 802-809, Nov. 2021.
<https://doi.org/10.14710/jkm.v9i6.31527>

Nadiyah, Husnun, 2017. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kepesertaan Program JKN Di Wilayah Kerja Puskesmas Remaja Kota Samarinda. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Samarinda. Vol.6 No.2 (2017) Jurnal Penelitian

Notoatmodjo Soekidjo, 2017, Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan (Revisi). Jakarta : Rineka Cipta

Oktriyanto, 2016. Penyelenggaraan Pelayanan Keluarga Berencana Dalam Jaminan Kesehatan Nasional. *ur. Ilm. Kel. & Kons.*, Mei 2016, p : 77-88 Vol. 9, No.2 ISSN : 1907 – 6037 e-ISSN : 2502 – 3594

Rohmawati, I, 2018. Hubungan Pengetahuan tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan Perilaku Keluarga dalam Mengikuti Program BPJS. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 6(2), 147–152

Rustiana. 2017. Analisis Kepuasan Jaminan Kesehatan Nasional Pada Pengguna BPJS Kesehatan Di Kota Semarang. *Unnes Journal of Public Health* 6(1): 53